

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah upaya membangun kemampuan masyarakat dilakukan melalui proses pembelajaran petani dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian secara baik dan benar didukung oleh kegiatan pembangunan pertanian lainnya. Kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu proses berkesinambungan untuk menyampaikan informasi serta teknologi yang berguna bagi petani dan keluarganya. Kegiatan ini diusahakan agar tidak menimbulkan ketergantungan antara petani dan penyuluh tetapi untuk menciptakan kemandirian petani dalam mengembangkan kelompok taninya. Selain penyuluhan pertanian keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kemampuan kapasitas sumber daya manusia pertanian sebagai pelaku pembangunan khususnya petani. Sebagai pelaku pembangunan, petani diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha tani (Departemen Pertanian, 2008).

Menurut Mardikanto (1991: 40) kunci pentingnya penyuluhan dalam proses pembangunan didasari oleh kenyataan bahwa pelaksana utama pembangunan adalah masyarakat kecil yang umumnya termasuk golongan ekonomi lemah, baik lemah dalam permodalan, pengetahuan, keterampilan maupun lemah dalam hal peralatan teknologi yang diterapkan. Disamping itu mereka juga seringkali lemah dalam hal semangatnya untuk maju dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa praktek penyuluhan yang bertujuan untuk menawarkan atau memasarkan inovasi tersebut diadopsi oleh masyarakat, bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam praktek kegiatan penyuluhan selalu menuntut kerja keras, kesabaran, memakan banyak waktu dan sangat melelahkan. Sehingga pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan kian menjadi kebutuhan banyak pihak.

Dalam penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian memegang peranan penting dalam proses pembelajaran penyuluhan. Figur penyuluh pertanian yang dituntut adalah syarat dengan keteladanan yang dicirikan oleh sikap dan sifatnya yang penuh keberpihakan kepada kepentingan petani bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang dituntut untuk mengamankan keberhasilan program pembangunan pertanian semata-mata (Wiraatmadja, 1999: 55).

Penyuluh pertanian harus mampu berperan ganda yaitu menjadi guru, penasehat dan organisator. Bagi seorang penyuluh untuk menjalankan peran gandanya tersebut bukanlah hal yang mudah dilakukan. Diperlukan kemampuan dalam menampilkan perannya sesuai dengan penghargaan khalayak sasaran maupun organisasinya. Dengan begitu kualifikasi peran penyuluh menjadi sesuatu yang tidak saja penting, tetapi merupakan keharusan dalam mencapai efektivitas penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pada dasarnya adalah pendidikan dimana target/sasarannya yaitu para petani/peternak harus mengalami perubahan perilaku, dari mulai aspek yang bersifat kognitif, afektif dan akhirnya psikomotorik. Tentang hal ini, diakui bahwa penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku melalui pendidikan akan memakan waktu lebih lama, tetapi perubahan perilaku yang terjadi akan berlangsung lebih kekal. Sebaliknya, meskipun perubahan perilaku melalui pemaksaan dapat lebih cepat dan mudah dilakukan, tetapi perubahan perilaku tersebut akan segera hilang, manakala faktor pemaksanya sudah dihentikan. Oleh karena itu penyuluhan merupakan investasi untuk masa depan. Hasil dari penyuluhan tidak dapat diketahui dalam waktu yang singkat terlebih lagi jika tujuan utama suatu program penyuluhan adalah terjadinya adopsi suatu inovasi yang ditawarkan atau terjadinya perubahan perilaku sasaran, tentu akan membutuhkan waktu yang relatif lama (Wiriaatmadja, 1999).

Sedangkan Permen PAN No. 2/2008 menegaskan penyuluh pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh PNS yang diberi hak serta kewajiban secara penuh.

Kinerja penyuluh pertanian keberhasilan kerja yang dicapai oleh individu secara aktual dalam suatu organisasi sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan periode waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dapat dilihat atau yang dapat dirasakan. Kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan ketiga aspek perilaku yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Selama antara kinerja yang dimiliki petugas dengan kinerja yang dituntut oleh jabatannya terdapat kesenjangan, petugas tersebut tidak dapat berprestasi dengan baik dalam menyelesaikan tugas pokoknya. Kinerja seorang penyuluh dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: (a) bahwa kinerja merupakan fungsi dari karakteristik individu, karakteristik tersebut merupakan variabel penting yang mempengaruhi perilaku seseorang termasuk penyuluh pertanian, dan (b) bahwa kinerja penyuluh pertanian merupakan pengaruh dari situasional di antaranya terjadi perbedaan pengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap kabupaten yang menyangkut beragamnya aspek kelembagaan, ketenagaan, program penyelenggaraan dan pembiayaan (Jahi dan Leilani, 2006: 50).

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan Balai yang berhadapan langsung dengan sasaran penyuluhan pertanian sekaligus yang bertanggung jawab terhadap akibat penyuluhan yang diberikan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai penyuluh pertanian yang merupakan aparat yang berada di garis tugas terdepan lembaga penyuluhan pertanian di Indonesia. Dalam sistem kegiatan penyuluhan, kemampuan penyuluh akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tujuan penyuluhan pertanian.

Sejauh ini sedikit penelitian yang membahas tentang kinerja penyuluh pertanian. Untuk itu kinerja penyuluh perlu ditelaah lebih lanjut guna efektivitas penyuluhan pertanian sebagai kepedulian kita dengan kehadiran mereka sebagai fasilitator.

B. Perumusan Masalah

Kecamatan Lubuk Kilangan terdiri dari 7 kelurahan, (lampiran 1) penyuluh pertanian lapangan tersebar pada masing–masing wilayah binaan. Secara keseluruhan Kota Padang memiliki 68 orang penyuluh pertanian. Penyuluh tersebut tersebar di 3 (tiga) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kota Padang : yaitu BPP Marapalam, BPP Nanggalo, dan BPP Koto Tangah.

Wilayah Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan berada di BPP Marapalam yang terdiri dari 27 orang penyuluh yang tersebar di Kecamatan Pauh 8 orang, Lubuk Begalung 5 orang, Bungus Teluk Kabung 5 orang, Kecamatan Lubuk Kilangan 5 orang, Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan 4 orang. (Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang, 2015).

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian didaerah khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang terdapat beberapa permasalahan yang mendasar, yaitu penghasilan penyuluh pertanian masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah, biaya operasional penyuluh pertanian belum dapat dinikmati oleh semua penyuluh. Berdasarkan pra survei di lapangan wilayah kerja yang jauh dari tempat tinggal memerlukan biaya cukup besar untuk sampai ke tempat kerja masih menjadi kendala bagi aparat penyuluh pertanian apalagi dengan tidak adanya biaya operasional bagi penyuluh pertanian. Kondisi balai penyuluhan sangat mempengaruhi kenyamanan penyuluh pertanian di lapangan dalam berkantor karena merupakan home-base bagi penyuluh pertanian yang berkompeten dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Keberadaan Balai Penyuluhan yang didukung dengan sarana dan prasarana penyuluh yang memadai menjadi dorongan tersendiri bagi penyuluh pertanian dalam pelaksanaan tugasnya, dan sebaliknya ketidaktersediaan dukungan sarana dan prasarana penyuluhan, akan mempengaruhi kemampuan dan motivasi penyuluh pertanian. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan dukungan sarana dan prasarana penyuluh belum sepenuhnya tersedia, misalnya fasilitas internet, kesediaan alat bantu penyuluh pertanian dan sarana transportasi baik dalam jumlah maupun dalam kualitas.

Dari segi frekuensi pelatihan yang diikuti oleh penyuluh masih sangat rendah, mengakibatkan kemampuan penyuluh yang rendah pula. Rendahnya pelatihan juga mempengaruhi kepangkatan penyuluh, karena salah satu unsur penilaian angka kredit penyuluh adalah frekuensi pelatihan yang pernah diikuti oleh penyuluh pertanian. Keberhasilan penyuluhan pertanian di Kecamatan Lubuk Kilangan bukan semata-mata tergantung pada teknis penyuluh pertaniannya saja tetapi merupakan gabungan dari seluruh aspek mulai dari pelaksanaan, tupoksi penyuluh pertanian, kelembagaan, metode penyuluhan pertanian yang digunakan.

Dari permasalahan yang ada maka penelitian ini penting kiranya untuk melihat suatu kajian tentang kinerja penyuluhan pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Lubuk Kilangan, penelitian perlu menjawab masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya di BPP Marapalam Wilayah Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja penyuluh di BPP Marapalam Kota Padang?

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Marapalam Wilayah Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Lubuk Kilangan.
2. Mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja penyuluh.

D. Manfaat penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang penyuluhan, dan Menjadi titik tolak bagi penelitian–penelitian yang lebih mendalam tentang kinerja penyuluh pertanian.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kelembagaan penyuluh dan dapat membantu dalam evaluasi kinerja penyuluh pertanian.

